

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian indikator sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

Skala Nilai Peringkat Kinerja No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	76 - 90	Tinggi
3	66 - 75	Sedang
4	51 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,90	18,23	96,46	Sangat Tinggi	BPS
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	4,56	88,54	Tinggi	BPS
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	96,90	4141,03	Sangat Tinggi	BPS

Dari tabel 3.2 digambarkan bahwa analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yaitu **Meningkatnya Hasil Pembangunan Industri Pengolahan** dengan indikator sebagai berikut:

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)

Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	$= \frac{\text{Realisasi Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) Tahun 2025}}{\text{Target Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) Tahun 2025}} \times 100\%$
---	---

Pada tahun 2025 untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) ditetapkan target 18,90%. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada gambar 3.1 kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebesar 18,23%. Dari data tersebut capaian yang diperoleh adalah mencapai

96,46%. Hal ini mengindikasikan untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) pada kriteria penilaian realisasi kinerja termasuk **kategori Sangat Tinggi**.

Gambar 3.1. Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Lapangan Usaha	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	14,11	13,81	14,76	13,03	13,93
B. Pertambangan dan Penggalian	23,29	24,24	24,28	24,11	23,99
C. Industri Pengolahan	18,67	18,22	17,89	18,19	18,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	10,77	10,79	10,60	10,80	10,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,22	14,18	14,15	14,66	14,30
H. Transportasi dan Pergudangan	2,51	2,52	2,41	2,44	2,47
I. Penyediaan Akomodasi Makanan Minum	2,01	2,09	2,07	2,14	2,08
J. Informasi dan Komunikasi	3,07	2,89	2,83	2,94	2,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,05	2,09	2,13	2,10
L. Real Estate	2,99	3,01	2,98	3,11	3,02
M,N. Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	2,58	2,28	2,47	2,44
P. Jasa Pendidikan	2,12	1,99	2,06	2,28	2,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,61	0,60	0,66	0,62
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,70	0,68	0,68	0,69	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

$$\text{Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025}}{\text{Target Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 untuk indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ditetapkan target 5,15%. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada gambar 3.2 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebesar 4,56%. Dari data tersebut capaian yang diperoleh adalah mencapai 88,54%. Hal ini mengindikasikan untuk indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada kriteria penilaian realisasi kinerja termasuk **kategori Tinggi**.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	5,40	2,33	7,85	7,71	5,79
B. Pertambangan dan Penggalian	3,64	5,73	0,52	4,03	3,42
C. Industri Pengolahan	3,92	5,61	5,20	3,50	4,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,39	4,68	6,04	5,76	6,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15
F. Konstruksi	2,92	8,13	8,12	4,96	6,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,07	8,85	8,52	8,48	8,48
H. Transportasi dan Pergudangan	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66
J. Informasi dan Komunikasi	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,26	2,74	1,94	11,30	4,47
L. Real Estate	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79
M.N. Jasa Perusahaan	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,95	-0,65	-0,02	4,47	3,40
P. Jasa Pendidikan	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	6,23	5,84	6,05	6,19	6,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

$$\text{Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (\%)} = \frac{\text{Realisasi Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Tahun 2025}}{\text{Target Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Tahun 2025}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada urusan perindustrian pada tahun 2025 dengan target yang ditetapkan sebesar 2,34%, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 96,90% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 4141,03%. Hal ini terjadi dikarenakan target yang ditetapkan jauh di bawah potensi riil atau hanya berdasarkan data historis yang sangat minimal. Untuk tahun mendatang, target akan direviu menggunakan basis data realisasi tahun berjalan sehingga lebih akuntabel.

Untuk perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, diuraikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)							18,90	18,23	96,46
	Sasaran Strategis: Meningkatkan Hasil Pembangunan Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,83	3,69	63,29	5,10	4,39	86,08	5,15	4,56	88,54
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	na	na	na	na	na	na	2,34	96,90	4141,03

Indikator kinerja tahun 2025 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 mengalami perubahan dari periode Renstra RPD Tahun 2024-2026. Indikator pertama Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) merupakan indikator baru yang pencapaian atas realisasi terhadap target adalah mencapai 96,46% dimana realisasi sebesar 18,23% dari target 18,90%.

Indikator kedua Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 88,54 %, pada tahun 2024 mencapai 86,08% yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,86%, dan pada tahun 2023 capaian kinerja adalah sebesar 63,29% dari target, dimana pertumbuhan terhadap capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 39,90%. Pertumbuhan terhadap tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya kesalahan penentuan target renstra pada periode RPD.

Indikator ketiga Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi merupakan indikator baru dimana capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 4141,03%. Capaian yang sangat besar tersebut dikarenakan ada kekeliruan dalam penentuan target. Kedepan akan dilakukan perbaikan atas target indikator sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Provinsi sesuai dengan kondisi yang ada.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terurai dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Dokumen Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir periode perencanaan (2030)	Capaian %
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	21,11	86,36
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	4,56	5,19	87,86
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	96,90	2,54	3814,96

Dari Tabel diatas digambarkan bahwa analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dibandingkan target pada akhir periode Renstra Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)

Pada akhir periode tahun 2030 untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) ditetapkan target 21,11% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 18,23% capaian yang diperoleh sebesar 86,36%.

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

Indikator kinerja ini pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 4,56 % dari target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2030 sebesar 5,19% capaian yang diperoleh sebesar 87,86%.

3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada urusan perindustrian pada tahun 2025 dengan target yang ditetapkan sebesar 2,34%, dimana realisasi yang diperoleh sebesar 96,90% sehingga capaian yang dicapai pada akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 3814,96%.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional seperti di tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	19,95	91,37
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	4,56	5,15	88,54
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	96,90	-	-

Dari Tabel diatas digambarkan bahwa analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dibandingkan target Standar Nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%), menurut standar nasional realisasi tahun 2025 sebesar 4,56% capaian yang diperoleh sebesar 91,37%.
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) menurut standar nasional realisasi tahun 2025 sebesar 19,95% capaian yang diperoleh sebesar 88,54%.
3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%), indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada urusan perindustrian pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dan tidak ada pada standar nasional.

Pada tabel 3.6 tersaji tingkat capaian indikator sasaran di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Yang Dilakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,90	18,23	96,46	Keberhasilan: sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Namun Kesenjangan Spasial dimana Industri pengolahan masih sangat terpusat di wilayah tertentu (seperti Palembang dan Banyuasin), sementara daerah pedalaman tetap bergantung pada ekstraksi mentah (pertambangan/pertanian) tanpa pengolahan memadai.	Untuk meningkatkan kontribusi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kebijakan terhadap percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	4,56	88,54		
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	96,90	4141,03		

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	96,46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
				- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
				- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	100%	Menunjang
				Program pengendalian Izin Usaha Industri			
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				(IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Provinsi			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertensu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	100%	Menunjang
				- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang	100%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	88,54	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
				- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100%	Menunjang
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4141,03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
				- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100%	Menunjang
				- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.7, secara keseluruhan program kegiatan sudah menunjang tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat dari persentase capaian atas pelaksanaan sub kegiatan yang telah mencapai 100% untuk mendukung secara langsung indikator sasaran.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.508.639.134	10.383.082.243	90,22
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.743.825	70.056.240	90,11
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.783.000	38.753.820	99,92
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.960.825	11.416.900	60,21
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.351.106.000	6.628.887.227	90,18
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.127.606.000	6.491.707.227	91,08
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.000.000	135.680.000	61,67
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0,00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	1.500.000	42,86
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0,00
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0,00
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.444.295	50.411.943	96,12
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.884.295	46.851.943	95,84
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.560.000	3.560.000	100,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.402.000	28.600.000	78,57

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.402.000	28.600.000	78,57
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.909.059	857.597.068	90,57
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.741.530	60.741.500	100,00
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.117.940	151.633.217	74,29
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.000.000	47.980.000	97,92
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	48.531.714	97,06
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.281.500	27.281.500	100,00
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.768.089	521.429.137	93,82
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.035.833.955	1.824.877.362	89,64
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.492.845	596.886.362	77,77
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.341.110	1.217.991.000	96,79
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.200.000	922.652.403	91,51
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.500.000	334.853.425	80,40
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.700.000	41.674.500	99,94
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	546.124.478	99,30
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34
vii i	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	44.970.705	34.207.780	76,07

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	135.341.600	105.671.166	78,08
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.013.529.000	1.009.644.495	99,62
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	612.864.732	611.225.806	99,73
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.078.920.000	872.563.738	80,87
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	39.328.794	38.321.495	97,44
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	242.128.750	214.034.595	88,40
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	242.128.750	214.034.595	88,40
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	145.405.725	117.842.520	81,04
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	96.723.025	96.192.075	99,45
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	172.318.250	165.825.837	96,23
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	172.318.250	165.825.837	96,23
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	87.940.250	82.028.927	93,28

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	84.378.000	83.796.910	99,31
		14.848.040.965	13.434.577.155	90,48

Berdasarkan Tabel 3.8, diketahui bahwa Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran yang mencapai 90,48% (realisasi anggaran) di tahun 2025. Sedangkan, rata-rata capaian realisasi kinerja fisik program-program pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera selatan adalah mencapai 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	135.341.600	105.671.166	78,08	21,92

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
			- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	84.378.000	83.796.910	99,31	0,69
			Program pengendalian Izin Usaha Industri								

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Provinsi								
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	145.405.725	117.842.520	81,04	18,96

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintah Pusat.							

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	96.723.025	96.192.075	99,45	0,55

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	612.864.732	611.225.806	99,73	0,27
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.013.529.000	1.009.644.495	99,62	0,38
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.078.920.000	872.563.738	80,87	19,13

No	Indikator Kinerja	% Realisasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peran Serta Masyarakat							

Untuk Indikator Kinerja Utama yang **pertama** yaitu Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB) yang tercapai 18,23% didukung oleh 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 135.341.600,- terrealisasi sebesar Rp105.671.166,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,92% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen); 2) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 84.378.000,- terrealisasi sebesar Rp 83.796.910,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,69% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen); 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 145.405.725,- terrealisasi sebesar Rp 117.842.520,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,96% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen); 4) Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui **Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)** yang terintegrasi dengan **Sistem Online Single Submission Risk Base Approach**

(OSS RBA) dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 96.723.025,- terrealisasi sebesar Rp 96.192.075,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,55% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen)

Untuk Indikator Kinerja Utama yang **kedua** yaitu Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang tercapai 5,1% didukung oleh 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 612.864.732,- terrealisasi sebesar Rp 611.225.806,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,27% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen).

Untuk Indikator Kinerja Utama yang **ketiga** yaitu Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang tercapai 96,90% didukung oleh 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1.013.529.000,- terrealisasi sebesar Rp 1.009.644.495,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,38% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen). 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1.078.920.000,- terrealisasi sebesar Rp 872.563.738,- Terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,13% tanpa mengurangi kualitas dan volume output (tersedianya 1 Dokumen).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terkhusus indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi, target yang ditetapkan belum sesuai dengan kondisi yang ada. Kedepan akan dilakukan perbaikan atas target indikator sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Provinsi sesuai dengan kondisi yang ada agar pada saat evaluasi atas capaian kinerja dapat menghasilkan perbandingan realisasi kinerja yang sesuai dengan dokumen Renstra.

Penyelenggaraan program/kegiatan/subKegiatan secara keseluruhan telah terselenggara secara baik dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	100%	100	11.508.639.134	10.383.082.243	90,22	9,78	
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100%	100	77.743.825	70.056.240	90,11	9,89	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 dokumen	100	38.783.000	38.753.820	99,92	0,08	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 dokumen	100	18.960.825	11.416.900	60,21	39,79	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100%	100	7.351.106.000	6.628.887.227	90,18	9,82	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	38 orang / bulan	100	7.127.606.000	6.491.707.227	91,08	8,92	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1 dokumen	100	220.000.000	135.680.000	61,67	38,33	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1 laporan	100	3.500.000	1.500.000	42,86	57,14	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100%	100	52.444.295	50.411.943	96,12	3,88	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1 dokumen	100	48.884.295	46.851.943	95,84	4,16	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 laporan	100	3.560.000	3.560.000	100,00	0	
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100%	100	36.402.000	28.600.000	78,57	21,34	
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7	7 orang	100	36.402.000	28.600.000	78,57	21,34	
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100%	100	946.909.059	857.597.068	90,57	9,43	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1 Paket	100	60.741.530	60.741.500	100,00	0	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1 Paket	100	204.117.940	151.633.217	74,29	25,71	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1 Paket	100	49.000.000	47.980.000	97,92	2,08	
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1 Paket	100	50.000.000	48.531.714	97,06	2,94	
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1 Paket	100	27.281.500	27.281.500	100,00	0	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 laporan	100	555.768.089	521.429.137	93,82	6,18	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	100	2.035.833.955	1.824.877.362	89,64	10,36	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1 laporan	100	10.000.000	10.000.000	100,00	0	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1 laporan	100	767.492.845	596.886.362	77,77	22,23	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1 laporan	100	1.258.341.110	1.217.991.000	96,79	3,21	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	100	1.008.200.000	922.652.403	91,51	8,49	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9 Unit	100	416.500.000	334.853.425	80,40	19,60	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1 Unit	100	41.700.000	41.674.500	99,94	0,06	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1 Unit	100	550.000.000	546.124.478	99,30	0,70	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	100%	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66	
viii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100	100%	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66	
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1 dokumen	100	44.970.705	34.207.780	76,07	23,93	
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1 dokumen	100	135.341.600	105.671.166	78,08	21,92	
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1 dokumen	100	1.013.529.000	1.009.644.495	99,62	0,38	
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1 dokumen	100	612.864.732	611.225.806	99,73	0,27	
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1 dokumen	100	1.078.920.000	872.563.738	80,87	19,13	
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1 dokumen	100	39.328.794	38.321.495	97,44	2,56	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	230	230 Industri	100	242.128.750	214.034.595	88,40	11,60	
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	230	230 Industri	100	242.128.750	214.034.595	88,40	11,60	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	1 dokumen	100	145.405.725	117.842.520	81,04	18,96	
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1	1 dokumen	100	96.723.025	96.192.075	99,45	0,55	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	230	230 Industri	100	172.318.250	165.825.837	96,23	3,77	
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230	230 Industri	100	172.318.250	165.825.837	96,23	3,77	
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1 dokumen	100	87.940.250	82.028.927	93,28	6,72	
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1 dokumen	100	84.378.000	83.796.910	99,31	0,70	
					14.848.040.965	13.434.577.155	90,48	9,52	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Plafon Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 14.848.040.965,00 terealisasi sebesar Rp. 13.434.577.155,00 atau (90,48%) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.413.463.810,00 atau sebesar (10,52 %) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 (per 31 Desember 2025)

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4		5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.508.639.134	10.383.082.243	1.125.556.891	90,22	100,00	APBD
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.743.825	70.056.240	7.687.585	90,11	100,00	APBD
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.783.000	38.753.820	29.180	99,92	100,00	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.960.825	11.416.900	7.543.925	60,21	100,00	APBD
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.351.106.000	6.628.887.227	722.218.773	90,18	100,00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.127.606.000	6.491.707.227	635.898.773	91,08	100,00	APBD
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.000.000	135.680.000	84.320.000	61,67	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4		5	6	7
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	1.500.000	2.000.000	42,86	100,00	APBD
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0,00	0,00	APBD
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0,00	0,00	APBD
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.444.295	50.411.943	2.032.352	96,12	100,00	APBD
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.884.295	46.851.943	2.032.352	95,84	100,00	APBD
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.560.000	3.560.000	0	100,00	100,00	APBD
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.402.000	28.600.000	7.802.000	78,57	100,00	APBD
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.402.000	28.600.000	7.802.000	78,57	100,00	APBD
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.909.059	857.597.068	89.311.991	90,57	100,00	APBD
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.741.530	60.741.500	30	100,00	100,00	APBD
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.117.940	151.633.217	52.484.723	74,29	100,00	APBD
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.000.000	47.980.000	1.020.000	97,92	100,00	APBD
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	48.531.714	1.468.286	97,06	100,00	APBD
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.281.500	27.281.500	0	100,00	100,00	APBD
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00	0,00	APBD
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.768.089	521.429.137	34.338.952	93,82	100,00	APBD
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.035.833.955	1.824.877.362	210.956.593	89,64	100,00	APBD
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	0	100,00	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4		5	6	7
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.492.845	596.886.362	170.606.483	77,77	100,00	APBD
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.341.110	1.217.991.000	40.350.110	96,79	100,00	APBD
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.200.000	922.652.403	85.547.597	91,51	100,00	APBD
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.500.000	334.853.425	81.646.575	80,40	100,00	APBD
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.700.000	41.674.500	25.500	99,94	100,00	APBD
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	546.124.478	3.875.522	99,30	100,00	APBD
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.924.954.831	2.671.634.480	253.320.351	91,34	100,00	APBD
viii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.924.954.831	2.671.634.480	253.320.351	91,34	100,00	APBD
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	44.970.705	34.207.780	10.762.925	76,07	100,00	APBD
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	135.341.600	105.671.166	29.670.434	78,08	100,00	APBD
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.013.529.000	1.009.644.495	3.884.505	99,62	100,00	APBD
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	612.864.732	611.225.806	1.638.926	99,73	100,00	APBD
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.078.920.000	872.563.738	206.356.262	80,87	100,00	APBD
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	39.328.794	38.321.495	1.007.299	97,44	100,00	APBD
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	242.128.750	214.034.595	28.094.155	88,40	100,00	APBD
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	242.128.750	214.034.595	28.094.155	88,40	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4		5	6	7
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	145.405.725	117.842.520	27.563.205	81,04	100,00	APBD
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	96.723.025	96.192.075	530.950	99,45	100,00	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	172.318.250	165.825.837	6.492.413	96,23	100,00	APBD
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	172.318.250	165.825.837	6.492.413	96,23	100,00	APBD
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	87.940.250	82.028.927	5.911.323	93,28	100,00	APBD
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	84.378.000	83.796.910	581.090	99,31	100,00	APBD
Jumlah		14.848.040.965	13.434.577.155	1.413.463.810	90,48	100,00	